

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: JANUAR RAHMAN SANTOSO

NIM: 126231062

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT
PEMERINTAH DAERAH**

(STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG)



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: JANUAR RAHMAN SANTOSO

NIM: 126231062

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Januar Rahman Santoso

126231062

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah analisis Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. Ruang lingkup penelusuran mencakup Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Lampung sepanjang rentang Tahun Anggaran 2014 hingga 2023. Variabel bebas mencakup kuantitas temuan berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan jumlah pelanggaran pada wilayah Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sementara variabel terikat merujuk pada Opini Audit Pemerintah Daerah. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data tingkat lanjut yang diperoleh lewat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Lampung sepanjang Rentang Tahun Anggaran 2014-2023. Berdasarkan penelitian, sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan BPK.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the analysis of the Internal Control System (SPI), and Compliance with Statutory Regulations on Local Government Audit Opinions. The scope of the investigation covers the BPK Audit Report on Financial Statements of Regency/City Governments in Lampung Province throughout the Fiscal Year Range from 2014 to 2023. Independent variables include the quantity of findings related to the Internal Control System and the number of violations in the area of Compliance with Statutory Regulations. While the dependent variable refers to Local Government Audit Opinions. The data analysis method uses a qualitative descriptive approach. The data sources used are advanced-level data obtained through the Financial Audit Report of the Audit Board regarding Local Government Financial Statements in the Lampung Province area throughout the Fiscal Year Range of 2014-2023. Based on the research, the internal control system and non-compliance with statutory regulations do not provide significant analysis of the audit opinion formation in local government financial statements published by BPK.

Keywords: *Government's Internal Control System, Local Government's Financial Report, Internal Control System findings*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala atas segala berkat dan kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Program Studi PPA Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Keluarga dan teman serta sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2024

Januar Rahman Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1. Teori Keagenan.....	3
2.2. Opini Audit Pemerintah Daerah.....	3
2.3. Sistem Pengendalian Intern.....	4
2.4. Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan.....	5
2.5. Kerangka Konseptual.....	6
2.6. Hubungan Antar Variabel	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
3.1. Objek Penelitian.....	9
3.2. Metode Penelitian	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1. Hasil	10
4.2. Pembahasan.....	11
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	15
5.1. Simpulan	15
5.2. Saran	15
5.3. Keterbatasan.....	15
5.4. Implikasi Penelitian	16
DAFTAR PUSTAKA	17

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Opini dan Temuan Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 s.d. 2023	10
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen sentral pada proses pembangunan wilayah. Keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan menjadi tuntutan yang semakin mendesak dari khalayak. Guna menjamin penyelenggaraan keuangan daerah berlangsung secara produktif dan rasional, otoritas telah menerbitkan serangkaian regulasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan fondasi yuridis yang kuat dalam wilayah pengawasan pengelolaan keuangan negara, meliputi pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menekankan pentingnya sistem pengendalian intern yang berkualitas guna mencegah penyimpangan serta kekeliruan pada ranah pengelolaan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjabarkan secara rinci prosedur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan utama penerapan SAP adalah meningkatkan mutu serta kehandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak signifikan pada kualitas laporan keuangan dan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan kajian terhadap catatan keuangan lembaga pemerintah secara sistematis guna memberikan penilaian mengenai kelayakan pelaporan keuangan.

Studi terdahulu berkenaan dengan hubungan antara kerentanan sistem pengendalian intern dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan menghasilkan temuan yang bertentangan. Riset Safitri dan Darsono (2014) memaparkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern tidak memberikan dampak bermakna terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Berlawanan, penelaahan Afwan dan Nurwulan (2019) menemukan bahwa identifikasi kelemahan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Kajian yang diselenggarakan oleh Kusumawati dan Ratmono (2017) menguraikan bahwa temuan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaruh signifikan pada opini audit laporan

keuangan pemerintah daerah. Berlawanan dengan hal tersebut, penelaahan Afwan dan Nurwulan (2019) mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan memberikan pengaruh signifikan pada opini laporan keuangan pemerintah daerah. Merujuk pada celah penelitian dari studi terdahulu, tampak ketidakselarasan mengenai variabel-variabel yang memengaruhi opini pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kelemahan sistem pengendalian intern memberikan dampak opini audit yang dikeluarkan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Lampung?
2. Apakah kepatuhan perundang-undangan memberikan dampak terhadap opini audit yang diterbitkan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mengenai dampak kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada perundang-undangan terhadap opini audit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini untuk akademisi adalah sebagai perluasan gagasan efektivitas SPI dan penilaian kuantitatif kepatuhan hukum dan peraturan sebagai faktor dalam pembentukan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Manfaat penelitian untuk praktisi antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan BPK, sebagai bagian dari kegiatan pemeriksaan BPK yang berkesinambungan, khususnya terkait dengan masalah kelemahan SPI dan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan, pada saat penyusunan opini atas hasil pemeriksaan tersebut;
 - b. Meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, serta efektivitas pengembangan SPI tingkat entitas dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan di lingkungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Fauzi Nur, & Nurwulan, Liza Laila. (2019). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidakpatuhan Tentang Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat)*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas.
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*, Durham, North California, May 2013.
- Kusumawati, Dwi, & Ratmono, Dwi. (2017). *Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 177–191.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Safitri, Ni Luh Ketut Shanti Antik, & Darsono, Darsono. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah*. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.